RAKYAT KALBAR

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2015 | Hal. : 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dana Pilkada Dianggarkan Dua Kali

KPU Persilakan BPK Audit

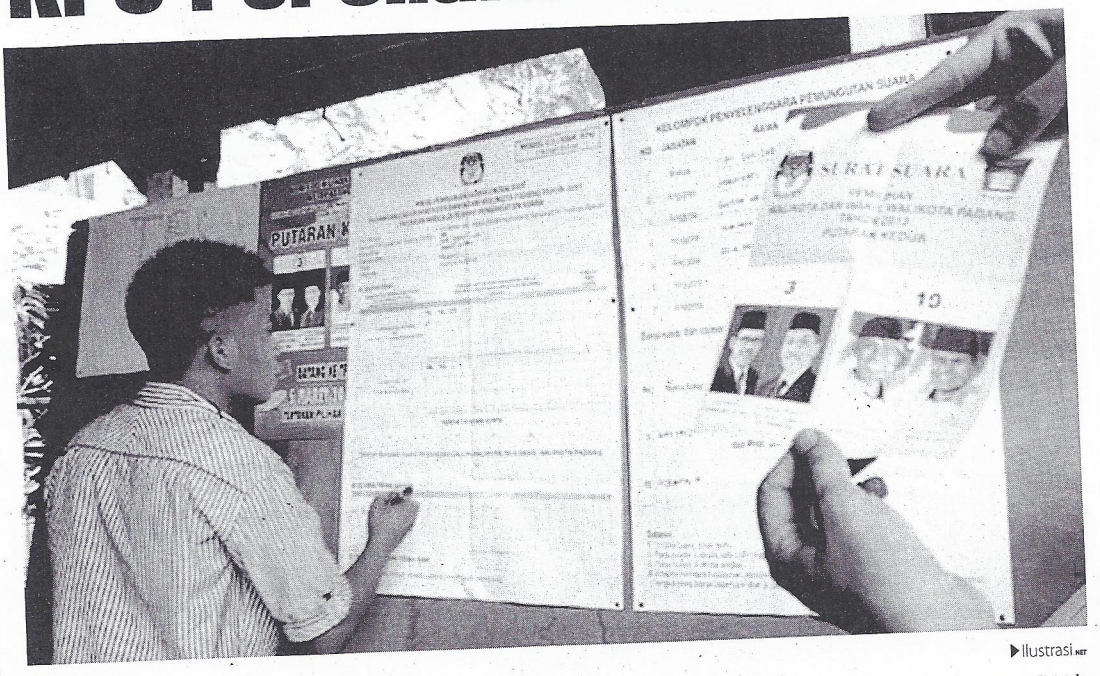

▶Ilustrasi.NET

PONTIANAK-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar tidak mempermasalahkan, apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan dilakukan serentak 2015 ini.

Wacana BPK akan mengaudit anggaran Pemilukada daerah tersebut lantaran adanya desakan dari pimpinan Komisi II agar BPK mengaudit penyelenggara Pilkada 2015.

Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty mengaku tidak mempermasalahkan apabila BPK akan melakukan audit terhadap anggaran Pemilukada. "Kalau audit mekanisme konstitusional memang setelah pelaksanaan Pemilu, anggaran pasti diaudit oleh BPK. Kita tidak masalah itu karena sudah mekanisme," ungkap Umi, Kamis (11/6).

Ia menegaskan, sepanjang anggaran Pemilukada ini digunakan sesuai prosedur, bagi pihak KPU daerah tidak masalah dan mempersilakan BPK untuk mengaudit.

Sementara itu mengenai anggaran Pemilukada yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten di Kalbar, menurut Umi, anggaran untuk di APBD murni semua sudah teranggarkan.

"Tapi memang ada beberapa kabupaten yang anggaran masih akan dipenuhi di APBD perubahan atau dibahas lagi," katanya.

Mengenai hal tersebut, KPU Kalbar akan meminta laporan dari kabupaten yang penganggarannya dua kali, yaitu di APBD murni dan APBD perubahan.

"Kita mintakan laporan dari KPU kabupaten yang penganggaran dua kali anggaran ini. Artinya dana mereka terima dari APBD murni akan habis perkiraan di bulan berapa, sehingga ketika habis di bulan itu seketika itu juga Pemda bisa melakukan transfer anggaran untuk tahapan berikutnya," katanya.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, pemerintah Kalbar tentunya tidak mempermasalahkan, apabila anggaran Pemilukada diaudit oleh BPK. "Tidak masalah, karena Pilkada tetap ada penganggaran, baik APBD mungkin di pusat sendiri ada APBN," ungkap Christiandy.

Ia menjelaskan, penggunaan dana negara bisa diaudit, sehingga wajar saja apabila BPK melakukan audit terhadap anggaran Pemilukada. "Jadi saya kira wajar saja, supaya diawasi saya kira pengawasan bukan hanya ada pada BPK, tapi termasuk anggota Dewan dan masyarakat turut mengawasi," ujarnya. Christiandy menambahkan, mengenai hal tersebut, pemerintah provinsi tidak ada masalah, pemerintah mendukung apabila BPK mengaudit anggaran Pemilukada.

Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono